



PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GEMBONG

KABUPATEN PATI TAHUN 2017 - 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
I. 1 Latar Belakang.....	I.1
I. 2 Landasan Hukum.....	I.2
I. 3 Maksud dan Tujuan	I.3
I. 4 Sistematika Penulisan	I.4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II.1
II. 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan.....	II.2
II. 2 Sumber Daya Kecamatan.....	II.7
II. 3 Kinerja Pelayanan Kecamatan	II.17
II. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gembong.....	II.25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III.1
III. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gembong	III.1
III. 2 Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III.8
III. 3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah	III.12
III. 4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III.16
III. 5 Penentuan Isu-isu Strategis	III.18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV.1
IV. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gembong	IV.1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V.1
V. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gembong.....	V.1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	VI.1
VI.1 Program dan Kegiatan	VI.1
BAB VII KENERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII.1
BAB VIII PENUTUP	VIII.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Gembong	II.2
Gambar 2.2	Peta Kecamatan Gembong	II.12

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan	II.4
Tabel II. 2	Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan	II.7
Tabel II. 3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	II.7
Tabel II. 4	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan	II.8
Tabel II. 5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan	II.9
Tabel II. 6	Sarana Prasarana Kecamatan	II.10
Tabel II. 7	Kawasan Perencanaan Dilingkup Kecamatan Gembong	II.12
Tabel II. 8	Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur di Kecamatan Gembong	II.13
Tabel II. 9	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kecamatan Gembong	II.14
Tabel II. 10	Profil Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Gembong	II.14
Tabel II. 11	Profil Penduduk Menurut Jenis Agama di Kecamatan Gembong	II.15
Tabel II. 12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gembong Kab. Pati	II.17
Tabel II. 13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gembong Kab. Pati	II.22
Tabel II. 14	Analisa Untuk Tantangan dan Peluang	II.26
Tabel II. 15	Analisis KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan	II.29
Tabel III. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III.1
Tabel III. 2	Data Dukung Masalah Pokok	III.4
Tabel III. 3	Data Dukung Masalah	III.4
Tabel III. 4	Data Dukung Akar Masalah	III.6
Tabel III. 5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Gembong Kab. Pati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III.9
Tabel III. 6	Telaah Renstra Perangkat Daerah	III.14

Tabel III. 7	Telaah KLHS Terhadap Kecamatan Gembong	III.17
Tabel III. 8	Hasil Analisa, Telaah dan Realisasi Kinerja Kecamatan	III.18
Tabel IV. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gembong	IV.2
Tabel V. 1	Peluang dan Pendorong Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan	V.1
Tabel V. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V.4
Tabel VI. 1	Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati	VI.2
Tabel VII. 1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruangan, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait kewajiban Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat(2) mengamanatkan bahwa “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Kecamatan Gembong sebagai salah satu perangkat daerah yang bertugas menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai kewajiban menyusun rencana strategis Kecamatan Gembong.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RENSTRA 2017-2022, serta amanat peraturan perundangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tertera dalam pasal 343 ayat (9) PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan

kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Pasal tersebut sebagai dasar penyesuaian kegiatan dalam perubahan RENSTRA. Berikutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diamanatkan setiap Perangkat Daerah agar melaksanakan pemetaan dari program/kegiatan lama ke Program/kegiatan/sub kegiatan baru. Amanat tersebut mengakibatkan terjadinya perbaikan indikator kegiatan yang masih bersifat hasil aktivitas, hal tersebutlah yang mendasari adanya perbaikan dan penajaman indikator output serta penyesuaian target kegiatan dalam perubahan RENSTRA.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2018 tentang tentang Rencana Strategis Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud perubahan RENSTRA Kecamatan Gembong

Renstra Kecamatan Gembong merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5(lima) tahun mendatang yang mana sudah dilaksanakan 2 (dua) tahun. Penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Gembong untuk Tahun 2017–2022 ini dimaksudkan untuk:

- 1). Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun.
- 2). Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Kecamatan Gembong yang ditetapkan dalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan.
- 3). Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus ditindaklanjuti dalam memenuhi Tujuan dan Sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.
- 4). Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun
- 5). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Gembong dalam kurun waktu 5(lima) tahun mendatang, yaitu: Tahun 2017–2022.

1.3.2 Tujuan Perubahan RENSTRA Kecamatan Gembong

Perubahan Renstra Kecamatan Gembong Tahun 2017 –2018 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan Gembong dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang

ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Gembong Tahun 2017–2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Kabupaten Pati dengan Renstra Kecamatan Gembong Tahun 2017 – 2022.
- 2). Sebagai dasar menyusun Rencana Kinerja Tahunan(RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di Wilayah Kecamatan Gembong.
- 3). Sebagai dasar pengukuran kinerja 5 (lima) tahun mendatang.
- 4). Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan perubahan Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang perubahan RENSTRA, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan PD terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada tahun yang sudah dilalui (2018, 2019) karena RENSTRA saat ini adalah RENSTRA perubahan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2020-2022.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan PD Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kabupaten Pati.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD Kabupaten Pati dalam 5 (lima) tahun mendatang;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

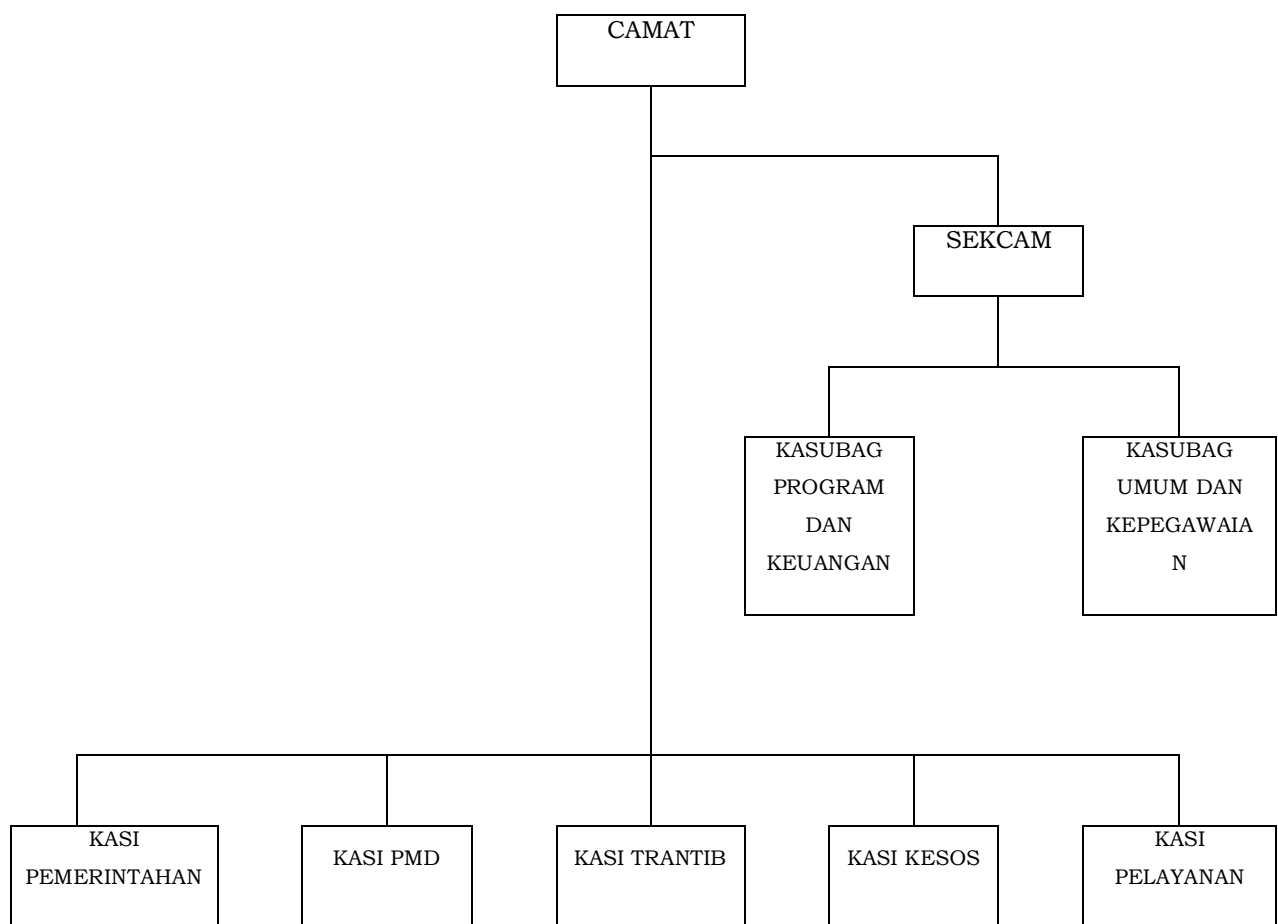
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gembong

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Gembong terdiri atas:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

KANTOR KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Gembong

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.

Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<p>(Satlakar) di tiap Kecamatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2020

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Gembong berjumlah 17 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang Pegawai Non PNS (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Gembong	2		5	2	6	2	17	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	1	2	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Staf PMD	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	-	-	
	- Staf Subbag Program & Keuangan	-	-	-	-	2	1	3	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	4	-	4	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2020.

Tabel II.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Gembong	-	-	4	0	1	1	4	3	4	-	13	4
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Staf Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	-Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Staf Subbag Program & Keu	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	4	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2020

Tabel II.5

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Gembong	4	-	5	4	-	-	4	0	13	4
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

No	Uraian	Gol. IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	- Kasi PMD	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Pelayanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Subbag Program & Keu	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	4	0	4	0

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2020

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6

Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	4	unit	Baik	
2	Ruangan	8	Ruangan	Baik	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	12	unit	9 baik, 2 kurang baik	
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	6	unit	6 baik	
6	- Laptop	8	unit	7 baik, 1 kurang baik	
7	- Printer	7	unit	7 baik,	
8	- Meja	20	unit	20 baik	
9	- Kursi	25	unit	25 baik	
10	- AC	6	unit	5 baik, kurang baik 1	
11	- Almari dan filling cabinet	8	unit	8 baik	
12	- Kipas angin	10	Unit	9 baik, 1 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Gembong, 2020

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 13 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 2 unit dikarenakan 2 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 6 unit dengan 6 dalam kondisi baik, maka ke depan tidak membutuhkan penambahan komputer lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 8 unit dengan kondisi 7 baik 1 kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan tidak membutuhkan penambahan laptop lagi.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 7 unit dengan 7 dalam kondisi baik, maka ke depan tidak membutuhkan penambahan printer lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 20 unit dengan 20 dalam kondisi baik, maka ke depan tidak membutuhkan penambahan meja lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 25 unit dengan 25 dalam kondisi baik, maka ke depan tidak membutuhkan penambahan kursi lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 6 unit dengan kondisi 5 baik 1 kurang baik, maka ke depan sudah masih membutuhkan penambahan 1 unit AC baru lagi.

Kondisi jumlah almari dan filling cabinet di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 8 unit dengan 8 dalam kondisi baik, maka ke depan tidak membutuhkan penambahan almari lagi untuk tempat arsip.

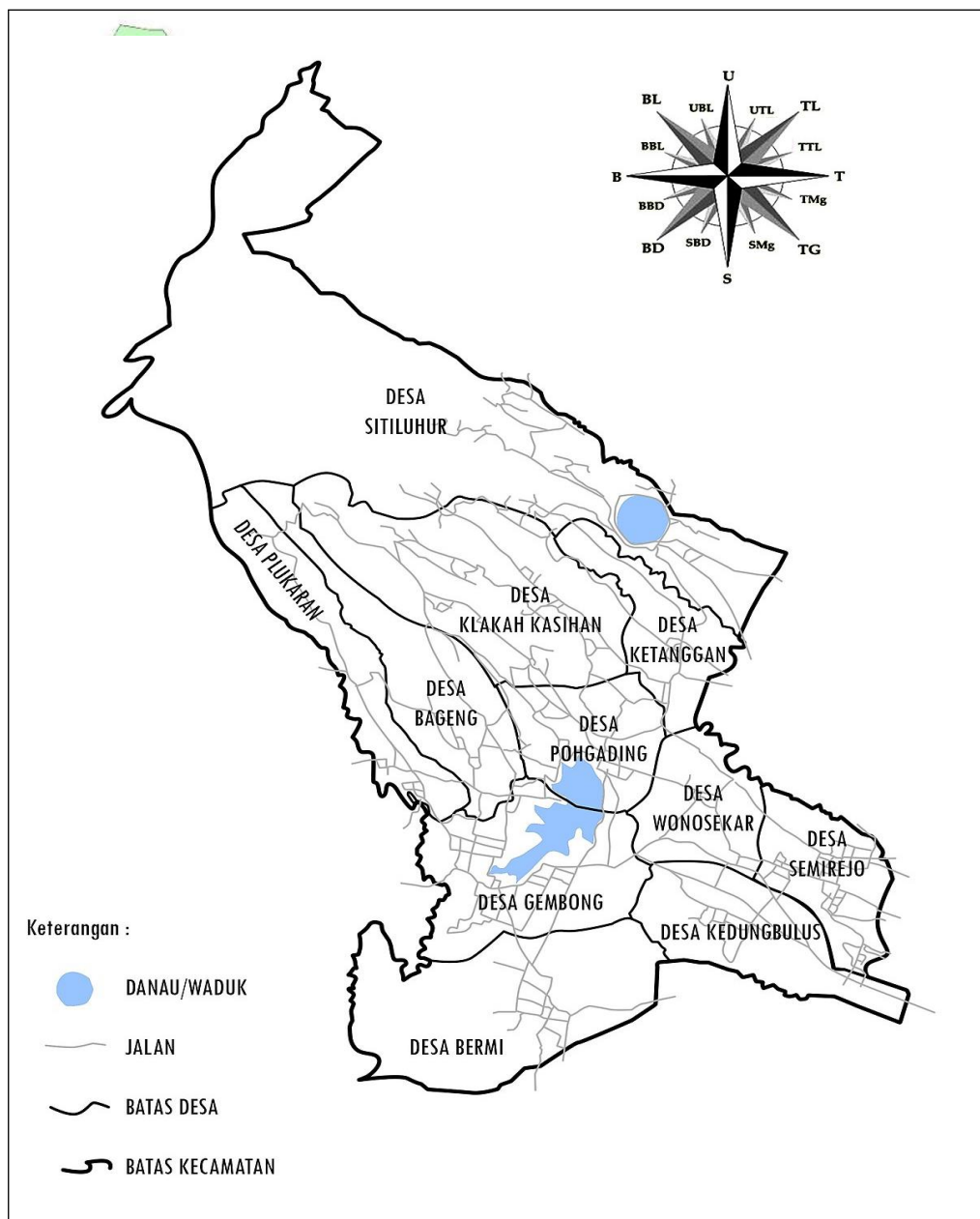
Kondisi jumlah kipas angin di Kecamatan Gembong saat ini sebanyak 10 unit dengan 9 dalam kondisi baik dan 1 kondisi rusak, maka ke depan tidak membutuhkan penambahan kipas angin lagi.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Gembong

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Gembong merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.730 Ha. Secara administratif Kecamatan Gembong dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Gembong

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Gembong dapat dilihat dalam tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7

Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Gembong

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Bermi	768	36	12	
2	Kedungbulus	525	12	3	
3	Semirejo	561	27	8	
4	Wonosekar	326	10	3	
5	Gembong	829	60	15	
6	Plukaran	573	24	9	
7	Bageng	655	26	11	
8	Pohgading	399	15	7	
9	Klakahkasihan	664	39	8	
10	Ketanggan	265	10	1	
11	Sitiluhur	1.165	20	7	

Sumber: Kecamatan Gembong dalam angka 2020

2.2.3.2. Keadaan penduduk

Kecamatan Gembong memiliki jumlah penduduk sebanyak 47.079 jiwa, yang terdiri dari 23.781 jiwa laki-laki dan 23.298 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Gembong tahun 2016 berjumlah 16.257 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2016 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 6,25 jiwa

per hektar. Profil kependudukan Kecamatan Gembong digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Gembong

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	1 627	53.5	1 411	46.5	3 038	100
2	5-9	1 619	50.5	1 585	49.5	3 204	100
3	10-14	1 808	52.4	1 643	47.6	3 451	100
4	15-19	2 031	53.2	1 789	46.8	3 820	100
5	20-24	1 611	53.5	1 402	46.5	3 013	100
6	25-29	1 433	49.2	1 476	50.8	2 909	100
7.	30-34	1 493	50.2	1 481	49.8	2 974	100
8	35-39	1 512	47.7	1 655	52.3	3 167	100
9	40-44	1 690	49.9	1 698	50.1	3 388	100
10	45-49	1 724	47.7	1 889	52.3	3 613	100
11	50-54	1 711	49.9	1 718	50.1	3 429	100
12	55-59	1 357	49.8	1 365	50.2	2 722	100
13	60-64	967	48.2	1 039	51.8	2 006	100
14	65-69	742	46.0	869	54.0	1 611	100
15	70-74	535	43.8	684	56.2	1 219	100
16	75+	609	41.3	865	58.7	1 474	100

Sumber: Kecamatan Gembong dalam angka 2019

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Gembong sebagai berikut:

Tabel II.9

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Gembong

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	4.743	4.924	9.667	20,78%
2	Belum tamat SD/MI	2.492	2.303	4.795	10,31%
3	SD/MI	7.687	8.103	15.790	33,94%
4	SMP/MTs	4.792	4.939	9.731	20,91%
5	SMA/SMK/MA	2.886	2.465	5.351	11,50%
6	DI/DII	92	119	211	0,45%
7	DIII	149	172	321	0,69%
8	S1	336	306	642	1,38%
9	S2	14	4	18	0,04%
10	S3	0	3	3	0,01%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Gembong sebagai berikut:

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Gembong

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	6.324	5.609	11.933	25,67%

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
2	Mengurus rumah tangga	2	7.355	7.357	16,49%
3	Pelajar/mahasiswa	2.743	1.980	4.723	10,59%
4	Pensiunan	127	53	180	0,40%
5	PNS	204	113	317	0,71%
6	TNI	23	0	23	0,05%
7	Polri	34	0	34	0,07%
8	Pedagang	68	81	149	0,33%
9	Petani/pekebun	3.935	2.183	6.118	13,72%
10	Peternak	25	1	26	0,05%
11	Nelayan	21	1	22	0,05%
12	Industri	0	2	2	0,004%
13	Konstruksi	3	0	3	0,006%
14	Transportasi	21	1	22	0,05%
15	Karyawan swasta	865	728	1.593	3,57%
16	Karyawan BUMN	146	55	201	0,45%
17	Karyawan BUMD	5	3	8	0,017%
18	Karyawan Honorer	21	19	40	0,089%
19	Buruh harian lepas	393	139	532	1,19%
20	Buruh tani	1.999	1.088	3.087	6,92%
21	Wiraswasta	5.262	2.959	8.221	18,43%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Gembong sebagai berikut:

Tabel II.11**Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Gembong**

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	ISLAM	23.446	22.932	46.378	98,51%
2	KRISTEN	332	363	695	1,47%
3	KATHOLIK	2	2	4	0,008%
4	HINDU	0	0	0	0,00%
5	BUDDHA	1	1	2	0,00004%
6	KHONGHUCU	0	0	0	0,00%
7	KEPERCAYAAN	0	0	0	0,00%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Terkait dengan kinerja Kecamatan Gembong selama dua tahun sebelumnya, menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Gembong dalam kurun periode 2018-2019 sebagai berikut:

Tabel II.12

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GEMBONG
KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan		100%	100%	100%	100%	100	100
2	Persentase pos kamling aktif		59%	61%	55%	55%	93	90
3	Persentase anggota Linmas aktif		70%	72%	65%	60%	93	83
4	Rasio Poskamling		3.9	4.2	5.4	5.8	138	138
5	Rasio Anggota Linmas		0.031	0.032	0.080	0.095	258	296
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan		0.6500	0.6550	0.6440	0.668	99	101
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100%	100%	100%	100%	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)		0.7500	0.7550	0.7351	0.7420	98	98
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)		0.6000	0.6050	0.6152	0.6580	102	108
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)		0.5900	0.5950	0.5818	0.6060	98	101
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100%	100%	100%	94%	100	94
12	Persentase LPMD aktif		100%	100%	100%	100%	100	100
13	Persentase PKK desa aktif		82%	85%	100%	100%	121	117
14	Persentase Karang Taruna aktif		44%	48%	80%	90%	181	187
15	Persentase RT/RW aktif		78%	76%	100%	100%	128	131
16	Persentase Posyandu aktif		78%	80%	100%	100%	128	125

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Persentase penyaluran rastra		100%	100%	100%	94%	100	94
18	Persentase penyaluran PKH		100%	100%	100%	94%	100	94
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)		100%	100%	100%	94%	100	94
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan		66%	68%	65%	68%	98	100
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		65%	70%	63%	61%	97	87
22	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100	100
23	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		70%	75%	60%	54%	85	72
24	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes kabupaten		5%	6%	12%	60%	240	1000

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		72%	74%	72%	100%	100	135
26	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100	100
27	Persentase keterisian data monografi kecamatan		70%	75%	60%	54%	85	72
28	Persentase keterisian data profil kecamatan		55%	60%	60%	54%	109	90
29	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa		65%	70%	70%	71%	107	101
30	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan		82%	85%	80%	87%	97	102
31	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu		100%	100%	92%	95%	92	95
32	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan		77%	79%	100%	100%	129	126

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	Pertumbuhan pemohon Paten		40	45	58	53	145	117
34	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100	100
35	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani		100%	100%	100%	100%	100	100

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% ($x < 100%$)) terjadi pada tahun 2018 dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan, akan tetapi sudah ada peningkatan rasio pada tahun 2019. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% ($x > 100%$)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelanggaran K3 bisa tertangani.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
- Indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan Dispendukcapil sehingga pelayanan bisa maksimal.
- Indikator Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten mengalami keberhasilan karena adanya penerapan sistem Pagu Indikator Kecamatan (PIK) yang merupakan pembatasan usulan ke tingkat Kabupaten untuk penjaringan skala prioritas.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kinerja pelayanan kecamatan Gembong diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.13

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GEMBONG

KABUPATEN PATI

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Pertumbuhan	
	4	5	4	5	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	211.808	295.823	211.808	225.822	100	76	39.66	6.6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	30.509	45.000	30.509	95.730	100	212	47.49	213.77
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.000	12.000	10.000	10.000	100	83	20	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	17.600	-	17.600		100	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Pertumbuhan	
	4	5	4	5	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.995	14.000	2.995	4.667	100	33	367.44	55.82
Program Penataan Administrasi Kependudukan	23.937	36.500	23.937	33.768	100	92	52.48	41.07
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	26.656	45.000	26.656	30.748	100	68	68.81	15.35
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	51.711	76.012	51.711	50.280	100	66	46.99	(2.76)
Program Pengembangan Data/ Informasi	5.373	10.441	5.373	7.976	100	76	94.32	0.01
Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	-	20.000	-	5.769	-	28	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-rata	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Pertumbuhan	
	4	5	4	5	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	15.965	29.000	15.965	16.777	100	57	81.64	5.08
Program Peningkatan Investasi dan Realisasi Investasi	11.668	19.000	11.668	32.977	100	173	62.83	182.62
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	11.521	32.000	11.521	54.079	100	168	177.75	369.39

Dari tabel II.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dilihat dari sisi efisiensi dan kewajaran dengan asumsi kinerja outcome tercapai terdapat hasil baik, seimbang dan kurang baik. Dalam penentuan proyeksi anggaran di RENSTRA jumlah anggaran tiap – tiap perangkat daerah mengacu pada kapasitas riil anggaran di RPJMD yang mana struktur anggarannya sudah dibagi dalam (P1) untuk progra wajib mengikat, (P2) untuk program prioritas dan (P3) program pendukung visi dan misi kepala daerah (P3). Program yang ada di Kecamatan Gembong hampir semuanya bersifat non fisik dan administratif. Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 penganggaran program ada yang seimbang dan kurang baik. Program pada tahun tersebut hampir 75% memiliki rasio yang seimbang ((100% ($x = 100%$))), dimana hal tersebut menunjukkan perencanaan dengan pelaksanaannya sesuai. Program yang 25% masuk kategori kurang baik ((100% ($x > 100%$))) terjadi pembengkakan anggaran, hal itu terjadi karena faktor perencanaan yang kurang tepat dengan penganggaran tahunan program yang mungkin disebabkan karena kurangnya data dan informasi yang ada.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2019 ditemukan bahwa program di Kecamatan Gembong ada yang baik ((100% ($x > 100%$))) dan kurang baik ((100% ($x > 100%$))). Efisiensi dan kewajaran dijadikan dasar dalam menganalisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran, dari sekian program hampir 75% yang rasio anggarannya bisa dianggap baik. Ketercapaian itu tak lepas dari faktor kemauan dan kemampuan sumber daya pegawai kecamatan dalam menyusun perencanaan dan mengolah anggaran dalam pelaksanaannya sehingga outcome tercapai sesuai dengan target. Rasio realisasi anggaran dengan penganggaran yang hasilnya kurang baik pada tahun 2019 dipengaruhi antara lain, pada perencanaan lima tahunan program pelayanan kepada masyarakat diperkirakan pengajuan masyarakat terhadap pelayanan (kependudukan/perijinan) tidak terlalu banyak. Kenyataannya pada saat pengajuan RENJA sesuai kondisi lapangan pengajuan masyarakat melebihi target rencana.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gembong

2.4.1 Analisis RENSTRA Perangkat Daerah terhadap tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Gembong

Kecamatan Gembong merupakan Perangkat Daerah yang termasuk dalam urusan penunjang kewilayahan, dimana urusan tersebut berfungsi menunjang pelayanan masyarakat yang mendukung keberhasilan visi dan misi kepala daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang. Kecamatan Gembong memberikan dukungan terhadap Misi I untuk urusan ketenteraman, ketertiban umum, Misi III untuk pemberdayaan masyarakat dan Desa, Misi IV untuk perencanaan, dan Misi VI untuk Penanaman modal. Dari analisa RENSTRA Perangkat Daerah dengan urusan diatas mempunyai kesamaan sasaran dalam mendukung tujuan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun, capaian sasaran yang hampir sama secara tidak langsung juga merupakan tanggungjawab Kecamatan Gembong dalam memberikan kontribusi capaian kinerja terhadap perangkat daerah tersebut, kinerja sasaran meliputi :

- 1) Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten dengan target capaian akhir 78
- 2) Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dengan target capaian akhir 75%
- 3) Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD dengan target capaian akhir 100%
- 4) Lama Proses Perizinan dengan target capaian akhir 3 hari
- 5) Persentase Surat Keterangan Pindah Datang dengan target capaian akhir 100%
- 6) Persentase Kepemilikan KK dengan target capaian akhir 100%
- 7) Persentase Kepemilikan KTP dengan target capaian akhir 95%

Sasaran kecamatan merupakan turunan dari tujuan RPJMD dan selaras dengan sasaran perangkat daerah serta adanya kesamaan program. dari hal tersebut dapat analisa permasalahan di kecamatan

terhadap sasaran OPD sehingga diketahui tantangan dan peluang yang ada sebagaimana Tabel II.14 berikut :

Tabel II.14
Analisa Untuk Tantangan dan Peluang

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten	Masih kurangnya bentuk pelayanan petugas LINMAS terhadap jumlah masyarakat yang harus dilayani	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Gembong yang mampu mempengaruhi masyarakat	Adanya Sinergitas dengan SATPOL yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan LINMAS
2	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa	1. LPMD di Desa masih banyak yang tidak diberdayakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa , sehingga mempengaruhi pembangunan yang ada dan berdampak pada lingkungan serta mempengaruhi Peningkatan produktivitas	1. Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD 2. Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
		<p>ekonomi desa, karena pemberdayaan</p> <p>2. Kurang berfungsinya koordinasi yang dilaksanakan oleh RT/RW terhadap permasalahan lingkungan di masyarakat</p>	<p>1. Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat</p>	<p>1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES</p> <p>2. Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet</p> <p>Adanya regulasi yang mengatur tentang kependudukan</p>

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
			<p>terjalannya koordinasi warga</p> <p>2. Kesejahteraan yang sesuai bagi koordinator ditingkat terendah (RT/RW) belum ada perhatian/kebijakan dari pemerintah</p>	
		<p>1. Masih banyak PKK dan Karang Taruna desa yang tidak berjalan/bergerak secara rutin</p> <p>2. Belum maksimalnya penyelenggaraan Posyandu di desa</p>	<p>1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata</p> <p>Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu</p>	<p>1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES</p> <p>1. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat</p>
3	Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	<p>1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Desa</p> <p>2. Kurangnya</p>	1. Definisi operasional tentang program/kegiatan di perangkat daerah dirumuskan lebih jelas	1. Adanya pembekalan pembelajaran bagi fasilitator penjangkaran usulan kegiatan

NO	ANALISA RENSTRA PD		TANTANGAN	PELUANG
	KINERJA SASARAN PD	MASALAH KECAMATAN		
		partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Kecamatan	1. Ketatnya proses verifikasi usulan kecamatan oleh OPD pengampu kegiatan	1. Adanya program Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dalam RKPD
4	Prosentase realisasi capaian kinerja RKPD	Keterisian Data monografi kecamatan belum maksimal terpenuhi dan validasi data belum semuanya dapat pertanggungjawabkan	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	1. Tersedianya base data dari BAPPEDA dan DISKOMINFO yang dapat dijadikan acuan data 2. Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data indonesia
5	Lama Proses Perizinan	Belum optimalnya pelayanan permohonan perijinan	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dari pemerintah daerah
6	Persentase Surat Keterangan Pindah Datang, KK dan KTP	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan	Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,	Adanya pelimpahan kewenangan dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

Dari analisis diatas dapat dilihat tantangan dan peluang yang timbul dari permasalahan yang ada sebagai faktor dari luar sesuai dengan kondisi saat ini.

2.4.2 Analisis KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Analisa Kecamatan Gembong terhadap KLHS dilihat dari aspek sosial yaitu kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata dapat dirumuskan tantangan dan peluang yang ada seperti pada tabel berikut :

Tabel II.15

Analisis KLHS Terhadap Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

No.	ISU KLHS	Program Kecamatan	Tantangan	Peluang
	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	1. Ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD 1. Pemerataan pembangunan penunjang perekonomian	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Adanya Pengawasan dan evaluasi terhadap masa berlaku perizinan dari OPD terkait	Pelimpahan kewenangan terkait pelayanan perijinan di kecamatan

Tantangan tersebut diatas akan menjadi masukan dalam penentuan isu strategis dan peluang yang ada akan menjadi usulan dalam perumusan strategi pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor – faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gembong

Kecamatan Gembong sesuai tugas dan fungsinya mengampu 4 (empat) misi sebagai bentuk dukungan kepada kepala daerah dalam menyelesaikan visi dan misi-nya. Misi yang terjemahkan dalam tujuan sudah menjadi ketetapan dalam RPJMD Kabupaten Pati, dari tujuan tersebut secara alur perencanaan diturunkan kedalam sasaran, strategi dan arah kebijakan menggunakan kerangka logis (cascading). Hasil dari alur perencanaan tersebut akan dilihat permasalahan yang ada sebagai berikut :

Tabel III.1

PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rendahnya Poskamling yang aktif dan masih kurangnya pelayanan anggota LINMAS kepada masyarakat	Rasio Poskamling dalam satu desa masih kurang dan rasio anggota LINMAS terhadap masyarakat masih belum memenuhi	Belum optimalnya koordinasi serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat
2	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL),	Belum aktifnya LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu di desa	Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	<p>1. Penyaluran rastra, PKH kepada masyarakat desa yang membutuhkan masih kurang tepat, cepat dan efektif</p> <p>2. Pemerataan penyaluran bantuan keagamaan belum maksimal</p>	<p>1. Rendahnya koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam penanggulangan kemiskinan diwilayah kecamatan</p> <p>1. Kurangnya koordinasi dalam penanganan masalah keagamaan diwilayah kecamatan</p>
4	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat belum sepenuhnya memuaskan	Lebih rendah/sedikit dokumen kependudukan yang dikeluarkan dibandingkan permintaan yang masuk
5	Belum optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	Masih rendahnya keterisian data dan validasi data monografi kecamatan serta profil kecamatan	Belum maksimalnya koordinasi pemetaan, pengumpulan dan verifikasi data yang dibutuhkan kecamatan dalam penyusunan monografi dan profil
6	<p>Sedikitnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan tertampung dalam Musrenbang Kabupaten</p> <p>Masih sedikitnya usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten</p>	<p>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti dan menghadiri Musrenbang tingkat Desa serta Musrenbang tingkat Kecamatan</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghadiri, mengikuti dan mengusulkan kebutuhan sesuai skala prioritas pada Musrenbang tingkat Desa dan</p>	<p>Belum pahamnya masyarakat akan kebutuhan yang prioritas dan batasan – batasan kewenangan untuk menjadi usulan dalam musrenbang</p> <p>Belum pahamnya masyarakat akan kebutuhan yang menjadi prioritas wilayahnya</p> <p>Belum pahamnya masyarakat terkait OPD yang menangani usulan mereka dan batasan – batasan kewenangan</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Musrenbang tingkat Kecamatan	yang bisa diusulkan
7	Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang diberlakukan	Laporan keuangan desa masih banyak yang tidak tepat waktu dan belum semua desa menyusun laporan keuangan sesuai standar pelaporan	Belum maksimalnya pembinaan dan pendampingan pengelolaan administrasi keuangan desa yang diberikan
8	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	Masih rendahnya sistem/bentuk pelayanan perizinan kepada masyarakat	Masih rendah/lebih sedikit dokumen izin yang dikeluarkan dibandingkan permintaan perizinan yang ada

Dari tabel diatas dapat dilihat seberapa banyak permasalahan yang muncul dari misi yang didukung oleh kecamatan Gembong antara lain masalah pokok yang mencapai 8 masalah, masalah mencapai 10 masalah, dan akar masalah sebanyak 11 masalah.

Permasalahan yang ada akan didukung oleh data sebagai dasar adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gembong. Data pendukung terbagi dalam tiga area yaitu data masalah pokok berisi data pembentuk dari indikator kinerja (sasaran), data masalah berisi data pembentuk dari indikator kinerja (program) dan akar masalah yang merupakan data hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Gembong, data dukung ditampilkan sebagai berikut :

Tabel III.2

Data Dukung Masalah Pokok

NO.	POKOK MASALAH	SATUAN	DATA SESUAI KEADAAN	
			2018	2019
1	Jumlah pos kamling di Kecamatan Gembong	Buah	48	50

NO.	POKOK MASALAH	SATUAN	DATA SESUAI KEADAAN	
			2018	2019
2	Jumlah anggota linmas di Kecamatan Gembong	Orang	336	342
3	Jumlah lembaga masyarakat yang ada di Kecamatan Gembong	lembaga	55	55
4	Jumlah fakir/miskin di Kecamatan Gembong	Orang	3.954	3.820
5	Jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan)	usulan	16	28
6	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan keseluruhan di Kecamatan Gembong	Pemohon	5.062	6.816
7	Jumlah pelayanan perijinan keseluruhan di Kecamatan Gembong	Pemohon	55	63
8	Jumlah data monografi kecamatan Gembong yang terisi	Data	1.140	1.160
9	Jmlah desa di Kecamatan Gembong	desa	11	11
10	Jumlah rumah ibadah se Kecamatan Gembong	Tempat ibadah	365	368

Data pendukung pada tabel masalah pokok diatas merupakan metadata dari formulasi indikator kinerja sasaran yang sudah dirumuskan dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan jenis data yang sifat sebagai elemen data.

Tabel III.3

Data Dukung Masalah

NO.	MASALAH	SATUAN	DATA SESUAI KEADAAN	
			2018	2019
1	Jumlah seluruh LPMD = 11 desa	Lembaga	11	11
2	Jumlah PKK seluruhnya = 11 desa	Lembaga	11	11
3	Jumlah karang taruna keseluruhan = 11 desa	Lembaga	11	11
4	Jumlah RW se Kecamatan Gembong	Lembaga	85	85
5	Jumlah RT se	Lembaga	276	276

NO.	MASALAH	SATUAN	DATA SESUAI KEADAAN	
			2018	2019
	Kecamatan Gembong			
6	Jumlah posyandu se Kecamatan Gembong	posyandu	56	56
7	Jumlah PKH se Kecamatan Gembong	Orang	2.090	2.110
8	Jumlah (rumah ibadah, takmir dll) yang seharusnya menerima bantuan keagamaan se Kecamatan Gembong	Tempat ibadah	352	352
9	jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	260	275
10	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	Orang	275	285
11	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	60	60
12	Jumlah laporan keuangan desa se Kecamatan Gembong	Laporan	11	11

Data pendukung pada tabel masalah diatas merupakan metadata dari formulasi indikator kinerja program yang sudah dirumuskan dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan data yang sifatnya sebagai sub elemen data.

Tabel III.4

Data Dukung Akar Masalah

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin laki - laki	Orang	23.284	21.194
2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perempuan	Orang	23.040	22.189
3	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	0	0
4	Jumlah Desa Berkembang	Desa	11	11
5	Jumlah Desa Maju	Desa	0	0
6	Jumlah Desa Agraris	Desa	11	11
7	Jumlah Desa Industri	Desa	0	0
8	Jumlah Desa Nelayan**	Desa	0	0
9	Jumlah Desa Wisata	Desa	0	1
10	Jumlah Aparat Linmas aktif	orang	48	49
11	Jumlah Aparat Linmas tidak aktif	Orang	23	23
12	Jumlah Pos Kamling aktif	pos	33	35
13	Jumlah Pos Kamling tidak aktif	Pos	31	29
14	Jumlah Karang Taruna (KT) aktif	Lembaga	11	11
15	Jumlah Karang Taruna (KT) tidak aktif	Lembaga	-	-
16	Jumlah PKK Aktif	Lembaga	11	11
17	Jumlah PKK Tidak Aktif	Lembaga	-	-
18	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Aktif	Lembaga	11	11
19	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tidak Aktif	Lembaga	-	-
20	Jumlah RW aktif	Lembaga	85	85
21	Jumlah RW tidak aktif	Lembaga	-	-
22	Jumlah RT aktif	Lembaga	276	276
23	Jumlah RT tidak aktif	Lembaga	0	0
24	Jumlah Posyandu aktif	Lembaga	56	56
25	Jumlah Posyandu tidak	Lembaga	0	0

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
	aktif			
26	Jumlah fakir/miskin penerima bantuan sesuai daftar penerima RASTRA (rastra, PKH)	Orang	2.350	2.351
27	Jumlah penerima bantuan keagamaan sesuai daftar penerima	Orang	246	247
28	Jumlah usulan masyarakat (usulan kecamatan) yang terealisasi dalam RKPD	usulan	16	28
29	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu yang terlayani	Pemohon	5.062	6.816
30	Jumlah pelayanan perijinan tepat waktu yang terlayani	Pemohon	55	63
31	Jumlah keterisian data monografi kecamatan	data	715	846
32	Jumlah keterisian data profil desa	Desa	7	7
33	Jumlah desa yang administrasi laporan pengelolaan keuangan desa tepat waktu	Desa	11	11
34	Jumlah desa yang administrasi laporan pengelolaan keuangan desa yang sudah tertib dan sesuai standar	Desa	11	11
35	Jumlah Masjid se Kecamatan Gembong	Masjid	71	72
36	Jumlah Langgar/Mushola se Kecamatan Gembong	Mushola	290	292
37	Jumlah Gereja se Kecamatan Gembong	Gereja	4	4
38	Jumlah Pura se Kecamatan Gembong	Pura	0	0
39	Jumlah Vihara	Vihara	0	0

NO.	AKAR MASALAH	SATUAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI DATA SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN
			2018	2019
	Kecamatan Gembong			
40	Jumlah Klenteng se Kecamatan Gembong	Klenteng	0	0

Data pendukung pada tabel akar masalah diatas merupakan metadata dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung realisasi kinerja dari target yang sudah direncanakan. data sifatnya sebagai sub elemen data.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pati periode tahun 2017-2022 adalah :

“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK.”

Visi tersebut diterjemahkan dengan 8 (delapan misi) untuk mewujudkan sebagai berikut :

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pati periodetahun 2017-2022:

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ketercapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib didukung oleh Kecamatan Gembong, diselaraskan dengan permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan pada sub bab 3.1 diatas untuk dasar penelaahan guna mendapatkan faktor – faktor penghambat dan pendukung yang ada di Kecamatan Gembong :

Tabel III.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Gembong Kab. Pati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi I Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.	Masih rendahnya Poskamling aktif dan anggota Linmas aktif	Kurang pedulinya masyarakat terhadap manfaat poskamling Belum optimalnya pelayanan LINMAS sesuai tugas dan fungsinya di Kecamatan Gembong	Kebijakan Kecamatan Gembong dalam pengaktifan kembali poskamling Adanya anggaran pembinaan LINMAS dari desa untuk peningkatan kapasitas
2	MISI III Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan lingkungan di desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Data penerima bantuan sosial yang kurang valid Belum optimalnya pemutakhiran data masyarakat fakir dan miskin	Labelisasi penerima bantuan yang bisa memperbarui penerima bansos Adanya sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS – NG) yang sudah diterapkan di desa pada tahun 2019 di

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				setiap desa
3	MISI IV Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Penggratisan biaya pengelolaan dokumen kependudukan Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan oleh kecamatan
		Belum optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	Pandangan sebelah mata terhadap pentingnya data dan informasi guna penyusunan monografi dan profil kecamatan	Penyusunan perencanaan kecamatan yang sudah berdasarkan pada data dan informasi Peningkatan SDM kecamatan terhadap pengelolaan data dan informasi
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten Masih sedikitnya usulan kecamatan yang masuk	Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan Petugas Fasilitator kecamatan belum optimal dalam memberikan pendampingan, mengarahkan, dan mengkondisikan usulan masyarakat	Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dalam RKPD kabupaten		
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang handal	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa
4	MISI VI Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha Banyaknya ijin usaha yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga di kecamatan	Penggratisan biaya pengurusan izin usaha selain IMB Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi

Dari hasil telaahan tersebut dapat dilihat adanya faktor - faktor penghambat dan pendorong dari dalam Kecamatan Gembong sesuai dengan kondisi wilayah dan sosial kemasyarakatan.

Ketercapaian Program Kepala daerah yang menjadi kewajiban Kecamatan Gembong untuk mendukungnya sesuai dengan keselarasan program di kecamatan sebagaimana berikut :

1. **Program masyarakat yang tertib, bersosial dan bermartabat** didukung oleh Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
2. **Program pemberdayaan masyarakat miskin** didukung oleh Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dan Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan.

3. **Program pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM** yang kompeten didukung oleh Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Pengembangan data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa.
4. **Program investasi daerah** didukung oleh program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

3.3 Telaahan RENSTRA Perangkat Daerah

Telaahan terhadap RENSTRA Perangkat Daerah yang searah atau didukung oleh Kecamatan Gembong ada 5 (lima) perangkat daerah kabupaten, telaah berfungsi untuk mencari factor – factor penghambat dan pendorong dari dalam Kecamatan itu sendiri. Perangkat daerah juga merupakan pengampu urusan yang wajib menyusun RENSTRA Perangkat Daerah, hasil dari perencanaan mereka ditelaah dengan batasan kesesuaian tujuan, sasaran dan program di Kecamatan Gembong sebagai berikut :

1. SATPOL PP :

Tujuan Persentase Penanganan Pelanggaran K3.

Sasaran Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator Persentase Personil Linmas yang terlibat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

2. DISPERMADES :

Tujuan Indeks Desa Membangun (IDM).

Sasaran Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Lingkungan.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Prosentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif.

3. BAPPEDA :

Tujuan dari Persentase Realisasi Capaian RPJMD.

Sasaran Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD dan Prosentase realisasi capaian kinerja RKPD.

Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Pemsosbud yang tertampung dalam Renja dan program Pengembangan Data/Informasi dengan indikator Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

4. DPMPTSP :

Tujuan Pertumbuhan Investasi Daerah.

Sasaran Lama Proses Perizinan.

Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan indikator prosentase Kesesuaian Perizinan.

5. DISPENDUKCAPIL

Tujuan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Kependudukan.

Sasaran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pencatatan Sipil.

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan indikator kinerja Peningkatan Kepemilikan KTP, Persentase Kepemilikan KK dan Persentase Keterangan Pindah Datang.

Dilihat dari sisi sasaran perangkat daerah dapat ditelaah sesuai kompetensi yang mampu dilaksanakan oleh Kecamatan Gembong sebagai bentuk dukungan guna ketercapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah saat periode RPJMD tahun 2017 – 2022, telaah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel III.6
Telaah RENSTRA Perangkat Daerah

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten	Kurang maksimalnya Rasio Poskamling dan rasio anggota Linmas	Kurang pedulinya masyarakat akan arti pentingnya poskamling dan Linmas	Adanya anggaran dari desa untuk membina anggota Linmas dan pengaktifan poskamling
2	Prosentase lembaga kemasyarakatan desa	Belum aktifnya LPMD, PKK, Karang taruna, RT/RW dan Posyandu di desa	Kurang antusiasme masyarakat dalam mengaktifkan lembaga desa Kurangnya peran yang diberikan oleh desa terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat	Adanya anggaran yang memadai untuk operasional lembaga desa Fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus/anggota lembaga pemberdayaan masyarakat
3	Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pembangunan	Fasilitasi dari kecamatan terhadap pelaksanaan penjangkaran dan musrenbang

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
			di wilayah kecamatan Masih sedikit masyarakat yang memahami tata laksanaan dan ketentuan pengusulan kebutuhan masyarakat	Penyediaan tenaga fasilitator oleh kecamatan Adanya pemilahan usulan prioritas untuk direalisasikan
	Persentase desa tertib administrasi pengelolaan keuangan	Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang diberlakukan	Kurangnya kompetensi SDM pengelola administrasi keuangan desa Sistem administrasi yang sudah aplikasi	Adanya Pendampingan/p elathan/bintek dalam penyelesaian proses administrasi keuangan
4	Lama Proses Perizinan	Belum maksimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha Kurangnya tenaga di kecamatan untuk menunjang proses pelayanan	Penggratisan biaya pengurusan izin usaha skala kecil selain IMB Kecamatan memiliki Kewenangan perijinan skala kecil Adanya sistem ijin usaha yang terintegrasi Sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan perijinan dan manfaat perijinan
5	Persentase Surat Keterangan Pindah Datang, KK,	Belum maksimalnya pelayanan surat keterangan pindah dating, pelayanan kartu keluarga, pelayanan kartu	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya	Penggratisan biaya pengurusan surat pindah dating

NO.	SASARAN PD	PERMASALAHAN	PENGHAMBAT	PENDORONG
	dan KTP	tanda penduduk kepada masyarakat	administrasi kependudukan Hasil dari pelayanan yang tidak langsung didapatkan oleh masyarakat karena hanya sebatas rekam data Tidak adanya alat cetak KTP di Kecamatan	Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan

Dari hasil telaah tersebut penghambat yang timbul dari dalam akan dijadikan salah satu acuan dalam penentuan isu strategis Kecamatan Gembong selain tantangan dari bab sebelumnya, dan pendorong yang dimiliki akan dijadikan pedoman strategi dalam penyelesaian hambatan.

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari hasil telaah KLHS terhadap isu KLHS terkait aspek sosial dalam hal ini kemiskinan jika diselaraskan dengan program di Kecamatan Gembong dapat dilihat perumusan penghambat dan pendorong yang ada sebagai berikut :

Tabel III.7
Telaah KLHS terhadap Kecamatan Gembong

No.	Isu KLHS	Program Kecamatan	Penghambat	Pendorong

	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	<p>2. Belum sepenuhnya tugas dan fungsi LPMD diberdayakan oleh pihak desa</p> <p>2. Pembangunan yang tidak sepenuhnya melibatkan LPMD akan kurang selaras dengan kebutuhan dalam peningkatan ekonomi desa</p>	<p>3. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa</p> <p>4. Adanya kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa dari Pemerintah Daerah</p>
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses perizinan usaha	Program peningkatan iklim investasi menjadi salah satu sasaran kecamatan dala perencanaan

Hasil telaah KLHS terkait isu yang bisa ikut didukung penyelesaiannya oleh Kecamatan Gembong akan berguna sebagai penyumbang masukan dalam perumusan isu dan penentuan strategi yang akan diimplementasikan dalam program/kegiatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan merupakan gabungan masalah masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lam. Penentuan isu – isu strategis tidak lepas dari adanya hasil analisis dan telaah pada Visi dan misi, RENSTRA OPD yang terkait dengan perencanaan Kecamatan Gembong dan KLHS, hasil analisis dan telaah yang dapat diambil adalah :

TABEL III.8**HASIL ANALISA, TELAHAH DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN**

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
1	Masih rendahnya Poskamling aktif dan anggota Linmas aktif	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Gembong yang mampu mempengaruhi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang pedulinya masyarakat terhadap manfaat poskamling dan fungsi dari LINMAS 2. Belum optimalnya pelayanan LINMAS sesuai tugas dan fungsinya di Kecamatan Gembong
2	Masih rendahnya Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan lingkungan di desa	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD 4. Pemerataan pembangunan penunjang perekonomian 5. Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati 6. Pembangunan yang tidak sepenuhnya melibatkan LPMD akan kurang selaras dengan kebutuhan dalam peningkatan ekonomi desa 7. Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga 8. Kesejahteraan yang sesuai bagi koordinator ditingkat terendah (RT/RW) belum ada perhatian/kebijakan dari pemerintah 9. Manfaat dan peran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social untuk mencapai/menjadi desa mandiri 2. Kurang antusiasme masyarakat dalam mengaktifkan lembaga desa 3. Kurangnya peran serta yang diberikan/dimanfaatkan oleh desa terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
		<p>penyamaan gender belum merata</p> <p>10. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu</p>	
	Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Verifikasi akhir pendataan masyarakat miskin oleh pemerintah pusat	<p>1. Data penerima bantuan sosial yang kurang valid</p> <p>2. Belum optimalnya pemutakhiran data masyarakat fakir dan miskin</p>
	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	<p>Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan</p> <p>Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil,</p>	<p>Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan</p> <p>Hasil dari pelayanan yang tidak langsung didapatkan oleh masyarakat karena hanya sebatas rekam data</p> <p>Tidak adanya alat cetak KTP di Kecamatan</p>
	Belum optimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan	Banyaknya penambahan data dan perubahan yang sering diamanatkan oleh pemerintahan daerah, provinsi maupun pusat	Pandangan sebelah mata terhadap pentingnya data dan informasi guna penyusunan monografi dan profil kecamatan
	Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	<p>2. Definisi operasional tentang program/kegiatan di perangkat daerah dirumuskan lebih jelas</p> <p>2. Ketatnya proses verifikasi usulan kecamatan oleh OPD pengampu kegiatan</p>	<p>Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan kebutuhan prioritas</p> <p>Petugas Fasilitator kecamatan belum optimal dalam memberikan pendampingan, mengarahkan, dan mengkondisikan usulan masyarakat</p>
	Belum semua desa	Sistem pengelolaan	Kurangnya kompetensi

NO	PERMASALAHAN	TANTANGAN	PENGHAMBAT
	mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	keuangan dengan aplikasi	SDM pengelola administrasi pengelolaan keuangan desa
	Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi Adanya Pengawasan dan evaluasi terhadap masa berlaku perizinan dari OPD terkait Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	1. Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha 2. Banyaknya izin usaha yang masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga di kecamatan 3. Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya izin usaha 4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait proses perizinan usaha 5. Kurangnya tenaga di kecamatan untuk menunjang proses pelayanan

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan sub isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan antara lain:

- 1) Kondusivitas pengurusan perizinan (misi VI)
- 2) Derajat Keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi (misi I)
- 3) kesejahteraan selanjutnya adalah Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan. Kelompok rentan dapat merujuk pada kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga rentan miskin, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan karena relasi gender yang belum setara dan adil. (misi III)
- 4) Perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang responsif berbasis teknologi informasi (*e-Government*)(misi IV administrasi kependudukan)
- 5) Isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis TI dengan data yang andal dan terbarukan(misi IV perencanaan dan data)

Dari hasil penyelarasan tersebut tersirat adanya kesamaan permasalahan di Kecamatan Gembong dengan sub permasalahan daerah, sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis yang

nantinya akan dijabarkan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Perumusan isu – isu strategis untuk Kecamatan Gembong adalah sebagai berikut :

1. Isu reformasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan Gembong serta koordinasi dengan dinas terkait dalam mempercepat proses pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat;
2. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban wilayah kecamatan dalam mendukung peningkatan perekonomian dan investasi;
3. Isu terkait peningkatan kualitas pembangunan (Kecamatan dan desa) serta lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
4. Isu terkait penguatan kelompok rentan dan penyetaraan gender.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun mendatang.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gembong

Tujuan Kecamatan Gembong yang diambil merupakan konsistensi terhadap RPJMD Kabupaten Pati periode tahun 2017 – 2022, dimana tujuan RENSTRA diambil dari sasaran RPJMD, perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Gembong dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu :

- 1) Misi I yaitu meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. Tujuan terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan.

Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

- 2) Misi III yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Sasaran meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

- 3) Misi IV yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik.

Tujuan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan, terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa.

- 4) Misi VI yaitu meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.

Tujuan terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan.

Penjabaran tujuan dan sasaran dari visi dan misi dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Gembong selama lima tahun akan diterapkan dalam perencanaan RENSTRA sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel IV.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GEMBONG**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi I : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal								
1	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermartabat di wilayah Kecamatan		Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100 %	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Persentase pos kampling aktif	59%	61%	63%	64%	66%
			Persentase anggota Linmas aktif	70%	72%	74%	76%	78%
Misi III : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan								
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah		Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.650	0.655	0.660	0.665	0.670

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kecamatan.							
			Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770
			Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.600	0.605	0.610	0.615	0.620
			Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.590	0.595	0.600	0.605	0.610
		Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.		100%	100%	100%	100%
Misi IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik								
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan		Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	66%	68%	70%	72%	75%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase Realisasi Capaian RKPDes	65%	70%	75%	80%	85%
			Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes Kabupaten	5%	6%	7%	70%	80%
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	55%	60%	65%	70%	75%
			Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes kabupaten	5%	6%	7%	70%	80%
		Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	74%	76%	78%	80%	100%
Misi VI : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri								
4	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk		Pertumbuhan pemohon Paten	50	55	60	65	70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan							
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100 %	100%	100%	100%	100%

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Gembong, dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2018 – 2022.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gembong

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi. Berdasarkan peluang dan pendorong yang didapatkan dari analisa pada Bab II dan telaah pada Bab III terhadap permasalahan yang ada akan dicantumkan pada tabel berikut:

Tabel V.1

Peluang dan Pendorong penentuan Strategi dan Arah Kebijakan

NO	PELUANG	PENDORONG
1	Adanya Sinergitas dengan SATPOL yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan LINMAS	Adanya anggaran dari desa untuk membina anggota Linmas dan pengaktifan poskamling
2	<p>1) Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa</p> <p>2) DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa</p> <p>3) Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES</p> <p>4) Peningkatan BUMDES</p>	<p>1) memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri</p> <p>2) Anggaran yang memadai untuk operasional lembaga desa</p> <p>3) Fasilitasi peningkatan kapasitas pengurus/anggota lembaga pemberdayaan msyarakat</p> <p>4) Labelisasi penerima bantuan yang bisa memperbarui penerima bansos</p> <p>5) Adanya sistem Sistem Informasi</p>

NO	PELUANG	PENDORONG
	<p>merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet</p> <p>5) Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES</p> <p>6) Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif merupakan target kinerja bagi DISPERMADES</p> <p>7) Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat</p>	<p>Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS – NG) yang sudah diterapkan di desa pada tahun 2019 di setiap desa</p>
3	<p>1) Adanya pembekalan pembelajaran bagi fasilitator penjangkaran usulan kegiatan</p> <p>2) Adanya program Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) dalam RKPD</p> <p>3) Tersedianya base data dari BAPPEDA dan DISKOMINFO yang dapat dijadikan acuan data</p> <p>4) Terbitnya Permendagri tentang satu data Indonesia</p>	<p>1) Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan</p> <p>2) Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu indikator kecamatan (PIK)</p> <p>3) Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa</p> <p>4) Penyusunan perencanaan kecamatan yang sudah berdasarkan pada data dan informasi</p> <p>5) Peningkatan SDM kecamatan terhadap pengelolaan data dan informasi</p> <p>6) Penyediaan tenaga fasilitator oleh kecamatan</p> <p>7) Adanya pemilahan usulan prioritas untuk direalisasikan</p>

NO	PELUANG	PENDORONG
	Sistem keuangan yang terintegrasi	Adanya Pendampingan/pelathan/bintek dalam penyelesaian proses administrasi keuangan
4	<p>1) Pelimpahan kewenangan dari PEMDA Pati terkait Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro</p> <p>2) Kesesuaian Perizinan merupakan prioritas kinerja program dari DPMPTSP</p>	<p>1) Penggratisan biaya pengurusan izin usaha selain IMB</p> <p>2) Adanya sistem izin usaha yang terintegrasi</p> <p>3) Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan oleh kecamatan</p> <p>4) Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan perijinan skala kecil</p> <p>5) Sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelayanan perijinan dan manfaat perijinan</p> <p>6) Program peningkatan iklim investasi menjadi salah satu sasaran kecamatan dalam perencanaan</p>
5	Adanya pelimpahan kewenangan dari dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP	<p>1) Penggratisan biaya pengurusan surat pindah dating</p> <p>2) Kewenangan yang dimiliki kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan</p> <p>3) Adanya sosisalisasi kepada masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan</p>

Dari peluang dan pendorong yang ada dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan lima tahunan Kecamatan Gembong akan dapat ditentukan strategi dan arah kebijakan dari penjabaran tujuan dan sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gembong dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel V.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik

Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum 2. Pemberdayaan dan penguatan peran Linmas.
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa 2. Pengikutsertaan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sesuai tugas dan fungsinya
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan 2. Peningkatan koordinasi bantuan keagamaan penunjang ibadah masyarakat di wil. Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra dan PKH) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan. 2. Pelaksanaan evaluasi bagi masyarakat penerima bantuan kemiskinan 3. Optimalisasi dan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan keagamaan
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Optimalisasi pelayanan adminsitasi kependudukan kecamatan di segala aspek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM pelayanan administrasi kependudukan 2. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
	Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem data dan informasi 2. Optimalisasi sistem dan program perencanaan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi 2. Peningkatan keterisian data monografi dan profil kecamatan 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 2. Perumusan kegiatan sesuai kewenangan dan kemampuan OPD dalam melaksanakan kegiatan
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Peningkatan system dan tata kelola administrasi Keuangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM pengelola administrasi keuangan desa 2. Optimalisasi standar pelaporan administrasi keuangan desa
Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Optimalisasi pelayanan dan system pelayanan perizinan terpadu di Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM pelayanan perijinan 2. Pelayanan gratis kepada masyarakat yang mengajukan perizinan

Hasil perumusan tujuan, sasaran , startegi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Gembong dalam penyusunan perencanaan tahunan/RENJA perangkat daerah karena hal tersebut merupakan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Gembong, Kabupaten Patikedepan tercantum dalamTabel VI.1 di bawah ini.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati

Tahun 2018-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	211.806	100%	228.250	100%	253.187	100%	277.502	100%	307.688	100%	1.278.433	Kecamatan Gembong	
		4.08.4080.2.01.001	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani	550 surat	500	1.500	750	3.000	900	3.000	1000	3.950	1200	6.500	4.350	19.950	Kecamatan Gembong	
				Jumlah arsip dinamis	Jenis	7		7		7		7		7		35			
													1.000		1.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.2.01.002	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan	36 rekenin g	36	30.000	36	29.400	36	29.400	36	30.595	36	35.595	180	158.990	Kecamat an Gembon g	
				Jumlah layanan publik berbasis e-Gov	Paket	0		0		0		1		1		2			
		4.08.4080.2.01.003	Kegiatan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7 unit	7	4.760	13	9.800	13	8.160	13	9.724	13	13.724	59	46.168	Kecamat an Gembon g	

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gembong Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.2.01.006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	13 kendaraan dinas	10	2.750	10	5.950	11	4.000	13	6.050	13	8.050	56	26.800	Kecamatan Gembong	
		4.08.4080.2.01.008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum	2 orang/perbulan (selama 12 bulan)	2	25.832	2	28.859	2	33.000	2	36.400	2	39.500	10	163.591	Kecamatan Gembong	
		4.08.4080.2.01.010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	60 rim, 75 buah 50 botol	60	10.389	120	16.478	132	15.030	144	16.983	156	20.500	612	79.380	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
					20 dos	20		30		30		30		30		140			
		4.08.4080.2.01.011	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	360 buah	360	1.582	720	5.736	720	4.186	720	6.500	720	8.500	3240	26.504	Kecamatan Gembong	
					24 buku	24		48		48		48		48		216			
					6.058 lembar	6.058		6.000		61.000		62.000		63.000		252058			
		4.08.4080.2.01.012	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	55 buah	55	2.340	60	3.681	60	3.141	60	4.600	60	6.600	295	20.362	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.2.01.013	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pelatan dan perlengkapan kantor	70 unit			70	1.584	60	1.056	65	2.200	70	3.200	215	8.040	Kecamatan Gembong	
		4.08.4080.2.01.015	Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 eksemplar	24	1.386	24	1.386	24	1.386	24	1.500	24	2.500	108	8.158	Kecamatan Gembong	
		4.08.4080.2.01.016	Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	2.196 liter	2.196	17.897	2.250	18.206	2.300	23.533	3.600	25.600	3.900	29.619	1.394	114.855	Kecamatan Gembong	
												50		50		150			
												72		72		72			
												90		90		90			
												90		90		90			

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gembong Kabupaten Pati 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.2.01.017	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bahan logistik kantor	36 galon 12 dos	36 galon 12 dos	984 24 dos	48 galon 24 dos	984 36 dos	60 galon 36 dos	720 36 dos	60 galon 36 dos	1.500 36 dos	60 galon 36 dos	1.500 36 dos	60 galon 36 dos	5.688 36 dos	Kecamatan Gembong	
		4.08.4080.2.01.018	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	12 notulen rapat 420 laporan perjalanan	12 420	73.710 420	12 420	67.320 420	12 420	85.800 420	12 420	86.500 520	12 520	86.500 2.200	60 2.200	399.830	Kecamatan Gembong	
		4.08.4080.2.01.019	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis/ keamanan	Jumlah jasa layanan umum	2 orang/bulan (selama 12 bulan)	2	1.836	2	2.200	2	3.370	2	3.900	2	3.900	10	15.206	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.4080.2.01.022	Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5 orang/bulan (selama 12 bulan)	60	36.840	60	33.666	60	37.405	60	38.500	60	38.500	300	184.911	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
				Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Dokumen	12		12		12		12		12		60			
				Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12		12		12		12		12		60			
				Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Dokumen	14		14		14		14		14		70			
		4.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik.	65%	70%	30.509	73%	122.456	76%	135.834	78%	148.879	80%	165.074	80%	602.752	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4 0802. 02.00 5	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 Unit					1	20.000					1	20.000	Kecamatan Gembong	
		408.4 0802. 02.00 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor	0 Unit			2	15.600					3		8	15.600	Kecamatan Gembong	
		408.4 0802. 02.00 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah komulatif peralatan gedung kantor	0 unit			1	57.064					3		4	57.064	Kecamatan Gembong	
		408.4 0802. 02.01 0	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebel	3 unit	5	9.537									5	9.537	Kecamatan Gembong	
		408.4 0802. 02.01 7	Pengadaan peralatan computer dan kelengkapannya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya						1	15.000	2	30.000			3	45.000	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4 0802. 02.02 1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas camat	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 unit	1	2.024	1	10.760			1	40.500	1	46.500	4	99.784	Kecamatan Gembong	
		408.4 0802. 02.02 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	2 unit			2	20.215	2	40.500	2	42.000	2	60.500	8	163.215	Kecamatan Gembong	
		408.4 0802. 02.02 4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	10 unit pemeliharaan	10	18.948	10	18.817	11	60.334	12	36.379	13	58.074	56	192.552	Kecamatan Gembong	
		4.08.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya	88%	90%	10.000	91%	12.193	92%	13.516	93%	14.822	94%	16.434	94%	66.965	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4 0802. 03.00 2	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25 stel	25	10.000	25	12.193	27	13.516	27	14.822	27	16.434	131	69.965	Kecamatan Gembong	
		408.4 0802. 03.00 6	Kegiatan pembinaan disiplin ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	12 Laporan													Kecamatan Gembong	
		4.08.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	100%	100%	2.995	100%	3.924	100%	4.360	100%	4.336	100%	5.727	100%	21.342	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.40802.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	12 laporan	12	560	12	900	12	900	12	900	12	1.800	60	5.060	Kecamatan Gembong	
				Jumlah data kinerja yang terisi	8 jenis data	8		8		8		8		8		40			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
				Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD yang disusun	4 laporan	4		4		4		4		4		20			
		408.4 0802. 06.00 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1	1.233	1	1.200	1	1.200	1	1.200	1	1.200	5	6.033	Kecamatan Gembong	
		408.4 0802. 06.00 5	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 dokumen	2	677	2	724	2	724	2	1.136	2	1.191	10	4.452	Kecamatan Gembong	
					4 laporan evaluasi	4		4		4		4		4		20			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4 0802. 06.00 6	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD	2 dokumen	2	525	2	1.100	2	1.100	2	1.100	2	1.100	10	4.925	Kecamatan Gembong	
				Jumlah dokumen Perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD	2 dokumen	2		2		2		2		2		10			
		408.4 0802. 06.01 0	Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	1 dokumen					1	436			1	436	2	872	Kecamatan Gembong	
Prioritas 1							255.311		366.823		406.898		445.975		494.487		1.969.494		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN)																			
Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan				Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	51.711	100%	37.856	100%	41.992	100%	42.500	100%	47.700	100%	221.759	Kecamatan Gembong	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan			Persentase Poskamling aktif	59%	59%	51.711	61%	37.856	63%	41.992	64%	42.500	66%	47.700	66%	221.759		
				Persentase Anggota Linmas Aktif	70%	70%		72%		74%		76%		78%		78%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
	ketertiban																		
		4.08.16	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio poskamling	3,9%	3,9%	51.711	4,20%	37.856	5%	41.992	4,70%	42.500	4,9%	47.700	4,9%	221759	Kecamatan Gembong	
				Rasio linmas	0,03	0,031		0,032		0,033		0,034		0,035		0,035	-		
		408.4080.2.16.006	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	1 Laporan	1	51.711	1	37.856	1	41.992	1	42.500	1	47.700	5	221759	Kecamatan Gembong	
Meningkatnya keberdayaan				Indeks Desa Membangun (IDM) di	0.64	0.65		0.655		0.66		0.665		0.67		0.67		Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayahKecamatan				kecamatan														g	
				Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan			Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.740	0.750		0.755		0.760		0.765		0.770		0.770			
				Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.590	0.600		0.605		0.610		0.615		0.620		0.620			
				Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.580	0.590		0.595		0.600		0.605		0.610		0.610			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.18	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase LPMD aktif	30%	100%	26.656	100%	42.835	100%	47.515	100%	50.977	100%	53.000	100%	220.983	Kecamatan Gembong	
				Persentase PKK desa aktif	80%	82%		85%		86%		88%		90%		90%			
				Persentase Karang Taruna aktif	40%	44%		48%		58%		60%		65%		65%			
				Persentase RT/RW aktif	70%	73%		76%		78%		79%		80%		80%			
				Persentase Posyandu aktif	75%	78%		80%		83%		87%		90%		90%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4080.2.18.004	Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah laporan/paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	12 laporan	12	26.656	12	42.835	12	47.515	12	50.977	12	53.000	60	220.983	Kecamatan Gembong	
	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat			Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	--%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Gembong	
		4.08.22	Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan	Persentase penyaluran rastra	100%	--%	-	100%	31.566	100%	35.011	100%	37.500	100%	42.500	100%	146.577	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
			Gembong																
				Persentase penyaluran PKH	100%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmirdll)	100%	--%	-	100%		100%		100%		100%		100%			
		408.4080.2.22.001	Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan Gembong	12 Laporan	-	-	12	31.566	12	35.011	12	37.500	12	42.500	48	146.577	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
			Gembong																
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan pelayanan yang berkualitas di wilayah Kecamatan				Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gembong	52%	60%	11.668	65%	33.433	70%	37.086	75%	38.300	80%	43.500	80%	163.987	Kecamatan Gembong	
				Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65%		70%		75%		80%		85%		85%	-	Kecamatan Gembong	
				Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes kabupaten	4%	6%		7%		8%		10%		12%		12%		Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan			Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	23.937	100%	24.799	100%	27.509	100%	34.177	100%	38.500	100%	148.922	Kecamatan Gembong	
		4.08.17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	23.937	100%	24.799	100%	27.509	100%	34.177	100%	38.500	100%	148.922		
		408.4080.2.17.003	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan	5400 dokumen kependudukan	5.400	23.937	5.600	24.799	5.700	27.509	5.800	34.177	5900	38.500	28.400	148.922	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
	Terpenuhi yakebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan			Persentase keterisian data monografi dan profil Kecamatan Gembong	50%	60%	5.373	65%	19.257	70%	21.361	75%	25.500	80%	30.100	80%	101.591		
		4.08.15	Program Pengembangan data/Informasi	Persentase keterisian data monografi Kecamatan Gembong	75%	78%	5.373	80%	19.257	82%	21.361	84%	25.500	86%	30.100	86%	101.591	Kecamatan Gembong	
				Persentase keterisian data profil Kecamatan Gembong	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4080.2.15.006	Penyusunan Profil Kecamatan Gembong	Jumlah dokumen data Kecamatan Gembong (profil dan monografi Kecamatan Gembong)	2 dokumen	2	5.373	2	19.257	2	21.361	2	25.500	2	30.100	10	101.591	Kecamatan Gembong	
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa			Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	88%	89%	11.521	90%	30.529	91%	33.865	92%	37.322	93%	39.000	93%	152.237		
		4.08.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	90%	91%	11.521	92%	30.529	93%	33.865	94%	37.322	95%	39.000	95%	152.237		
				Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%		79%		81%		83%		85%		85%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		408.4080.2.19.004	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun	3 laporan / rekomendasi	3	11.521	3	30.529	3	33.865	3	37.322	3	39.000	15	152.237	Kecamatan Gembong	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan			Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten	4%	6%	15.965	8%	36.166	9%	40.117	11%	45.500	12%	51.390	12%	189.138		
		4.08.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	15.965	75%	36.166	78%	40.117	80%	45.500	82%	51.390	82%	189.138	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
				Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan Gembong	80%	82%		85%		87%		90%		92%		92%	-	Kecamatan Gembong	
		408.4080.2.21.009	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan Gembong	2 Dokumen	2	15.965	2	36.166	2	40.117	2	45.500	2	51.390	10	189.138	Kecamatan Gembong	
Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan				Pertumbuhan pemohon Paten	35	40	11.668	45	33.433	50	37.086	55	38.300	60	43.500	60	496.987	Kecamatan Gembong	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan			Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	11.668	100%	33.433	100%	37.086	100%	38.300	100%	43.500	100%	496.987	Kecamatan Gembong	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018		2019		2020		2021		2022					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	(17)	-18	-19	-20
		4.08.20	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	11.668	100%	33.433	100%	37.086	100%	38.300	100%	43.500	100%	496.987	Kecamatan Gembong	
		408.4080.2.20.010	Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Gembong (PATEN)	Jumlah izin yang dikeluarkan	60 dokumen izin	60	11.668	80	33.433	90	37.086	100	38.300	110	43.500	440	496.987	Kecamatan Gembong	
PRIORITAS III							146.831		256.441		284.457		311.776		345.690		1.365.195		
JUMLAH P-I DAN P-III							402.142		623.264		691.355		757.751		840.177		3.314.689		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Gembong yang mengacu pada sasaran RPJMD sebagai tujuan dalam RENSTRA Kecamatan Gembong yang diturunkan ke dalam sasaran dan program dengan indikator serta target kinerja yang sudah ditentukan dengan formula yang terukur, indikator kinerja ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.							
	Tujuan : Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan.							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	INDIKATOR TUJUAN 1							
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran I : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban							
	INDIKATOR SASARAN 1							
1.1	Persentase pos kampling aktif	59%	59%	61%	63%	64%	66%	66%
	Persentase anggota Linmas aktif	70%	70%	72%	74%	76%	78%	78%
	Sasaran Program : Terwujudnya Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kecamatan							
1.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Rasio pos kampling aktif	3,9	3,9	4,20	5	4,70	4,90	4,90
	Rasio anggota Linmas aktif	0,03	0,031	0,03	0,033	0,03	0,04	0,04
	Misi 3 :Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan							
	Tujuan : Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan							
2	INDIKATOR TUJUAN 1							
	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0.64	0.65	0.655	0.66	0.665	0.67	0.67
	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran : Meningkatnya peran serta lembaga							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kemasyarakatan dalam pembangunan							
2.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.740	0.750	0.755	0.760	0.765	0.770	0.770
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.590	0.600	0.605	0.610	0.615	0.620	0.620
	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.580	0.590	0.595	0.600	0.605	0.610	0.610
2.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Sasaran Program : Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan							
	Persentase LPMD aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase PKK desaaktif	80%	82%	85%	86%	88%	90%	90%
	Persentase Karang Taruna aktif	40%	44%	48%	58%	60%	65%	65%
	Persentase RT/RW aktif	70%	78%	76%	78%	79%	80%	80%
	Persentase Posyandu aktif	75%	78%	80%	88%	87%	90%	90%
	Sasaran 2 :Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.							
2.2	INDIKATOR SASARAN 2							
	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Program 2 :							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan							
	Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan							
	Meningkatnya koordinasi penyaluran bantuan keagamaan penunjang kebutuhan ibadah masyarakat di wilayah Kecamatan							
2.2.1	INDIKATOR PROGRAM 2 :							
	Persentase penyaluran rastra	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran PKH	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir, dll)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
	Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, dan mengutamakan pelayanan publik							
	Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan							
3	INDIKATOR TUJUAN 3							
	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	64%	66%	68%	70%	72%	75%	75%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase Realisasi Capaian RKPDes	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPDes kabupaten	5%	5%	6%	7%	70%	80%	80%
	Sasaran I : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan							
3.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Program 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan kecamatan (KTP, KK)							
3.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 2: Terpenuhi kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan							
3.2	INDIKATOR SASARAN 2.1							
	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	50%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
	Sasaran Program 2.1 :							
	- Tersedianya data monografi kecamatan							
	- Tersedianya data profil kecamatan							

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.2.1	INDIKATOR PROGRAM 2.1							
	Persentase keterisian data monografi kecamatan	50%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
	Persentase keterisian data profil kecamatan	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
3.3	INDIKATOR SASARAN 2.2							
	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	5%	5%	6%	7%	70%	80%	80%
	Sasaran Program : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan							
3.3.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	80%	82%	85%	87%	90%	92%	92%
	Sasaran 3 : Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa							
3.4	INDIKATOR SASARAN 3							
	Persentase desa dengan administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	72%	72%	74%	76%	78%	80%	80%
	Sasaran Program : Terciptanya administrasi pengelolaan keuangan desa yang tertib							
3.4.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	75%	77%	79%	81%	88%	85%	85%
	Misi 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri							
	Tujuan : Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan							
4	INDIKATOR TUJUAN 4							
	Pertumbuhan pemohon Paten	45	50	55	60	65	70	70
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan							
4.1	INDIKATOR SASARAN 1							
	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Program : Persentase pelayanan perizinan yang terlayani							
4.1.1	INDIKATOR PROGRAM 1							
	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
P E N U T U P

Renstra Perubahan Kecamatan Gembong dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi saat ini, serta masukan dari aspirasi masyarakat guna mendukung ketercapaian RENSTRA Kecamatan Gembong.

Renstra Perubahan Kecamatan Gembong Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang berisikan penjabaran visi dan misi Kecamatan selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pati.

Perubahan Renstra Kecamatan Gembong tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilalui yaitu tahun 2018 dan 2019. Hasil pelaksanaan Perubahan Renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Kecamatan Gembong dalam merealisasikan target kinerja yang sudah ditetapkan. Penyusunan Renstra Kecamatan Gembong pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu serta perencanaan periode berikutnya guna mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BUPATI PATI,

HARYANTO